

POLA PERKEMBANGAN KOTA PANGKALAN KERINCI

Okta Karnaely*

Abstract: The development of agro industry and agribusiness is believed to be one of the answers for the challenge in Riau province. One of the regencies, which grows because of agro industries and business, is Palalawan regency, especially the city of Pangkalan Kerinci. This research was conducted by means of interview to 98 respondents comprising local people, immigrants, government and industries in the area of Pangkalan Kerinci. The findings were analysed using descriptive and historical approach methods, which gave the description of the city condition before and after the local autonomy system adopted. From this research, it is known that there are significant changes happening in various living sectors, such as occupations, incomes, the gross regional domestic income or known as PDRB, public facilities, education and public health. There is also an increase in the number of people living in the urban area. It is undoubtedly that the present of agro industries and business has fuelled the development of the city, which started from the physical development toward the development of socio-economy. The development pattern seems to follow the sector model. It is hoped that each party in Pangkalan Kerinci urban area can work together continuously in order to develop the city and increase the prosperity in the community.

Keywords: *Agribusiness, Agro-industry, Palalawan Regency, City Development, Pangkalan Kerinci.*

Pendahuluan

Arah pembangunan jangka panjang Propinsi Riau adalah peningkatan pendapatan penduduk pedesaan, keseimbangan struktur ekonomi dan keseimbangan antar pembangunan sektoral dan spasial. Sektor kunci yang akan dikembangkan ialah pertanian, perkebunan, industri, perhubungan dan pariwisata. Hal tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau yang sebahagian besar bermukim di pedesaan, yaitu dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan pertimbangan letak wilayah yang strategis dalam struktur ekonomi regional. Untuk memenuhi harapan tersebut perlu dipilih strategi kebijakan pembangunan yang tepat.

Kebijakan pembangunan yang diyakini akan dapat menjawab tantangan tersebut adalah pengembangan agroindustri dan agrobisnis

yang lebih luas dan tersebar di beberapa wilayah di Propinsi Riau. Pembangunan industri yang berbasis pertanian akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur di sektor pertanian. Dalam perubahan tersebut terjadi transformasi struktur bisnis dari usaha tani menjadi usaha di industri pertanian dan di luar pertanian. Dengan pembangunan agroindustri yang berasal dari sumber daya alam, dapat diharapkan suatu dorongan terhadap keunggulan komperatif dan kompetitif. Selain itu pembangunan agroindustri di daerah sangat berpotensi dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi regional.

Salah satu upaya pembangunan agroindustri tersebut terdapat di daerah Kabupaten Palalawan, dimana di daerah ini terdapat beberapa industri yang berbasis pertanian seperti industri pulp, plywood,

* Dosen Fisipol Unri

kertas, panel dan industri pengolahan sawit. Beberapa dari industri tersebut berada di kota Pangkalan Kerinci yang juga merupakan ibukota dari Kabupaten Palalawan. Diantaranya adalah Industri Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Kota Pangkalan Kerinci sebelumnya merupakan bagian wilayah Kabupaten Kampar. Pangkalan Kerinci yang merupakan ibu kota Kabupaten Palalawan terbentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 53 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten baru di Propinsi Riau. Sebagai kabupaten baru, Pelalawan merupakan wilayah yang cukup potensial dengan berbagai asset dan komoditi yang dimiliki sehingga dapat dijadikan modal dasar dalam pembiayaan pembangunan. Diantara aset yang menonjol adalah keberadaan industri hasil hutan, industri pengolahan kelapa sawit dan industri perkebunan lainnya.

Sesuai dengan UU RI No. 53 th 1999, Kabupaten Pelalawan terdiri atas 4 kecamatan, kemudian dalam Surat Gubernur Prop. Riau Nomor 136/Tp/433, tentang Data Pokok Kabupaten Baru di Prop. Riau, Kabupaten Pelalawan dimekarkan menjadi 10 Kecamatan yaitu Kecamatan Langgam, Pangkalan Kerinci, Pangkalan Lesung, Pangkalan Kuras, Ukui, Kuala Kampar, Teluk Meranti, Kerumutan, Bunut dan Pelalawan. Dalam konsep Struktur Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pelalawan, ditetapkan 6 Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dimana Kota Pangkalan Kerinci termasuk dalam SWP I.

Perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada akhir tahun 2010 kurang lebih 393.400 jiwa yang berasal dari perkembangan penduduk berdasarkan data statistik sejumlah kurang lebih 280.000 jiwa. Dari perkiraan tersebut maka distribusi penduduk hingga akhir tahun 2010 yang tertinggi berada di SWP I yang berfungsi sebagai ibukota kabupaten yaitu sebesar 177.600 jiwa dan yang terendah di SWP V sebesar 9.900 jiwa.

Penduduk kota Pangkalan Kerinci berasal dari Masyarakat Melayu dengan mata pencaharian pokok bertani. Namun dengan adanya program transmigrasi dan pembukaan lahan-lahan perkebunan serta adanya pembangunan industri-industri pengolahan dalam bentuk pendirian pabrik maka terdapat semakin banyak dan beragam jenis suku, agama dan kebudayaan yang ada di kota Pangkalan Kerinci.

Berkembangnya kota Pangkalan Kerinci yang semula hanyalah desa kecil dimana sebelumnya jumlah penduduk relatif masih rendah sehingga sarana perekonomian salah satunya yaitu pasar desa hanya dapat diadakan sekali seminggu dengan mata pencaharian lebih dominan sektor pertanian. Di daerah pedesaan, dimana pada saat-saat tertentu muncul pasar-pasar berkala. Munculnya pasar periodik ini bukan hanya dalam sehari-hari tertentu dalam seminggu. Pasar-pasar seperti ini banyak terjadi di Indonesia terutama di daerah yang agak terpencil dan atau daerah yang relatif sederhana dalam perkembangannya. Biasanya pasar-pasar periodik muncul didaerah yang memiliki jumlah penduduk kecil dan para penjaja masih bersifat mobil.

Namun ketika jumlah penduduk telah mulai meningkat dan para penjaja tidak perlu bergerak, maka segera akan terbentuk pasar tetap, yang melayani konsumen setiap harinya. Pangkalan Kerinci yang dilalui oleh jalan lintas timur menjadikan kota ini mempunyai letak yang sangat strategis. Sehingga secara perlahan-lahan kota ini mulai menggeliat menunjukkan perkembangan yang sangat pesat.

Fenomena ini didukung oleh industri pulp, plywood, kertas, panel dan industri pengolahan sawit selain itu juga ada kegiatan perkebunan besar swasta dan HTI. Berkembangnya kota Pangkalan Kerinci sebagai pusat pertumbuhan juga tidak terlepas dari dukungan dari daerah interlandnya. Kehadiran perkebunan besar dan perusahaan-

pendatang baru yang tertarik untuk bermigrasi dan berurbanisasi. Kehadiran dari pendatang baru ini menimbulkan masalah penyingkiran yang dikenal dengan social exclusion (penyingkiran sosial), dan masalah sosial lainnya, sehingga penulis tertarik untuk mengkaji pola pengembangan kota Pangkalan Kerinci dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

Bagaimanakah pola perkembangan kota Pangkalan Kerinci karena daya tarik agroindustri dan agribisnis.

Untuk mengetahui pola perkembangan kota Pangkalan Kerinci karena daya tarik agroindustri dan agribisnis.

Metode penelitian

Wilayah Penelitian berada di ibukota Kabupaten Pelalawan yaitu Pangkalan Kerinci, karena Pangkalan Kerinci merupakan salah satu fenomena yang menarik dalam perkembangan kotanya yang sangat pesat dibandingkan daerah lain yang sama proses pembentukannya.

Jenis data yang diperlukan dapat dibedakan atas primer dan sekunder. Data primer bersumber dari jawaban atas pertanyaan yang diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan kuesioner terhadap responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dinas/ instansi yang terkait dengan permasalahan peneliti yang meliputi Monografi Kecamatan / Kabupaten serta publikasi lainnya.

Penentuan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling, yaitu dengan cara sengaja menetapkan respondennya. Dalam penelitian ini respondennya terbagi 4 yaitu penduduk tempatan dan pendatang serta aparat pemerintahan dan pihak perusahaan. Kriteria penentuan penduduk tempatan dan pendatang ditetapkan berdasarkan kriteria migrasi, yaitu pertama adalah yang telah menetap lebih dari 5 tahun dan yang kedua adalah berdasarkan

tempat kelahiran. Sedangkan dari aparat pemerintahan terdiri dari Sekda, Bappeda, Dinas PU, Camat, Kepala Desa, dari perusahaan dititik beratkan pada bagian Community Development disamping pimpinan perusahaannya.

Penetapan jumlah sampel dilakukan dengan memakai formulasi Tuwu (1993), yaitu

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

keterangan:

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi

e : nilai kritis (nilai yang digunakan 10%)

Untuk menentukan alokasi pengambilan sampel untuk kelompok masyarakat digunakan alokasi sebanding dengan formulasi Nazir (1988) sebagai berikut:

$$N_i = \frac{N_i \times n}{N}$$

keterangan:

n_i : jumlah sampel pada kelompok masyarakat i

N_i : jumlah populasi pada kelompok masyarakat i

N : jumlah populasi pada kedua kelompok masyarakat

n : jumlah sampel pada kedua kelompok masyarakat

Dengan menggunakan kedua formulasi diatas jumlah sampel keseluruhannya adalah 98 orang.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Pada dasarnya tabel frekwensi akan dipakai untuk mengungkapkan variabel-variabel yang akan dianalisis. Sesuai dengan tujuan penelitian maka perlu diberi batasan terhadap pengertian dari agroindustri dan perkembangan kota. Batasan yang diberikan adalah bahwa agroindustri merupakan kegiatan ekonomi dalam bentuk industri yang berada di kota

menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan, serta modal responden tempatan setelah

Jenis Pekerjaan	Tempatan		Pendatang	
	Jml	%	Jml	%
1. PNS	3	10,7	-	-
2. Swasta	-	-	-	-
3. Pedagang	4	14,3	5	8,9
4. Petani	21	75,0	37	66,1
5. Jasa	-	-	14	25,0
Jumlah	28	100,0	56	100,0

adanya industri. Sedangkan terjadi penurunan jumlah responden pendatang yang bekerja sebagai pedagang, dan sebaliknya terjadi penambahan yang cukup berarti dalam pekerjaan sebagai PNS/Swasta. Kenyataan ini menunjukkan bahwa adanya industri baru telah membantu responden pendatang dalam memperbaiki kualitas hidupnya. Sedangkan anggapan responden yang berasal dari pemerintah daerah yang bergerak di bidang jasa hanya 1/5 bagian dan sisanya (masing-masing 2/5 bagian) bekerja sebagai PNS/Swasta, dan pedagang. Namun mayoritas responden yang berasal dari PT. RAPP berasumsi bahwa pedagang adalah pekerjaan

yang diminati oleh penduduk tempatan setelah ada industri yaitu sebesar 60%. Hal ini dimungkinkan karena adanya peluang usaha yang terbuka untuk berdagang, seperti yang terdapat pada Tabel 2. berikut ini.

Responden tempatan merasa kehilangan peluang kerja setelah ada pendatang walaupun cuma sedikit namun responden tempatan yang menyatakan banyak kehilangan kesempatan kerja lebih besar dibandingkan dengan responden pendatang. Keadaan ini dapat terjadi karena responden tempatan merasa bahwa pendatang dengan rata-rata pendidikan yang lebih tinggi akan merebut peluang kerja

Tabel 2. Jenis Pekerjaan Penduduk Tempatan Setelah Ada Industri di Pangkalan Kerinci, Tahun 2002

Jenis Pekerjaan	Tempatan		Pendatang	
	Jml	%	Jml	%
1. PNS/Swasta	4	14,3	8	14,3
2. Pedagang	6	21,4	26	46,4
3. Jasa	15	53,6	22	39,3
4. Petani	3	10,7	-	-
Jumlah	28	100,0	56	100,0

mereka. Mayoritas responden pemerintah daerah dan RAPP menyatakan tidak ada kehilangan peluang untuk bekerja bagi penduduk tempatan yaitu masing-masingnya adalah 80% dan 60%. Hal ini disebabkan

karena mereka merasa telah memberi peluang pada penduduk tempatan. Tabel 3. dibawah ini menggambarkan keadaan diatas.

Tabel 3. Kehilangan Peluang dan Kesempatan